

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi – I / Medan Nomor : 41-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2012 Tanggal 08 Mei 2012)

JHON MERIS NAINGGOLAN, S.H.
NPM : A. 2021131006

1

(dua) juga putusan akhir terhadap perkara yang sama. Mengenai Hakim militer, dalam memeriksa dan memutus perkara diberikan kebebasan menurut undang-undang dan pertanggungjawaban putusnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak dipertanggungjawabkan kepada atasannya. Dan perlu adanya pengawasan Mahkamah Agung RI terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer di Indonesia.

Kata kunci: Peradilan Militer, Pidana Militer

ABSTRACT

Thesis writing is motivated by interest in one of the authors of the Military Court of appeal decision in this case the High Military Court -I / Medan criminal case is an appeal by the defendant of the Military Court of the I-05 / Pontianak (as the Military Court of First Instance). In writing this thesis that the problem is How the application of Article 227 of Law No. 31 of 1997 on Military Justice by the Military Court of appeal judge in the case of immoral and How should the decision of the Military Court of appeal in the case of sacrilegious in Article 227 of Law No. 31 1997 on Military Justice? Basically Military Court has its own characteristics, the core issues to be discussed in this thesis, namely; Is the High Military Court -I / Medan field determination mixing with the final decision, canceling the indictment Military Judge Advocate I-05 / Pontianak and the Military Court decision I-05 / Pontianak, as well as the Military Court ordered the I-05 / Pontianak to examine and adjudicate back The criminal case with the applicable provisions of the Criminal Procedure in accordance with Article 227 of Law of the Republic of Indonesia Numbe 31 of 1997 on Military Justice. This study was conducted in a normative juridical, where the authors examine or look at the application of the rules of law relating to the military criminal law for settling disputes. Research was also conducted with the retrieval of documents in the form of decisions that arise in this criminal case (5 decisions) and legislation and books related to this research, where it aims to determine how the application of Article 227 of Law No. 31 of 1997 on Military Justice in the High Military Court -I / Medan accordance with the provisions of applicable law. Based on the results, the conclusion that the decision of the High Military Court -I / Medan in the case study of this decision is not in accordance with Article 227 of Law No. 31 of 1997 on Military Justice. And as a result of the implementation of the decision, resulting in the Military Court of the I-05 / Pontianak there are two (2) final and the High Military Court -I / Medan there are two (2) is also a final decision on the same case. Regarding the military judge, in examining and deciding the case given the freedom statutory and accountability decision to God Almighty, not accountable to his superiors. And the need for supervision of the Supreme Court against decisions issued by the Court of Military Justice environment in Indonesia.

Key words: Military Justice, Military Criminal.

PENDAHULUAN

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang hukum, yang dikenal dengan pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materiilnya.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang – undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Realitanya saat ini, hukum itu sendiri kurang menarik di hati rakyat Indonesia. Padahal kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 ; “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sudah enam puluh sembilan tahun negara kita merdeka, bebas dari belenggu penjajahan namun pencanangan negara hukum tidaklah menghasilkan cita rasa yang mengkristal di hati seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah saat ini berupaya untuk memposisikan Indonesia sebagai negara hukum di hati rakyatnya. Namun demikian masih saja dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang membuat kesan di kalangan rakyat kecil penyebutan negara hukum sebuah kiasan dan bukan sebuah realita. Sebagai contoh, banyaknya para pejabat (penguasa) yang menghalalkan segala tindakannya dengan mensiasati hukum yang berlaku untuk kepentingan pribadinya ketimbang untuk tugas demi kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan negara sesuai sumpah jabatannya.

Bilamana mendasarkan pada penyebutan negara hukum tentunya tidak lepas dari persoalan produk hukum dan penegakan hukum. Produk hukum sangat terkait

dengan hukum yang dihasilkan oleh pembentuk hukum, yaitu lembaga legislatif, sedangkan penegakan hukum terkait dengan lembaga penegak hukum, senada dengan Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan¹, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan. Lembaga penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu lembaga negara tempat para Hakim yang mempunyai kekuasaan (disebut Kekuasaan Kehakiman) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hukuman bagi pelaku pelanggaran hukum.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, tidak ada intervensi sebagai mana dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya, yang diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen ke – III tahun 2001jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ;

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dari setiap badan peradilan tersebut, masing-masing memiliki sistem dalam menyelesaikan perkara atau kasus yang dihadapkan kepadanya untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Badan peradilan militer termasuk pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) yang susunan dan kekuasaan serta acaranya diatur dalam undang-undang tersendiri. Dikatakan pengkhususan karena peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan

¹ Nyoman, sarikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan penerbit Undip, Semarang, 2005, halaman 23.

militer. Sedangkan hukum militer terdiri dari norma-norma yang berasal dari berbagai bidang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional yang obyeknya adalah kehidupan militer, serta hanya berlaku bagi militer atau yang dipersamakan dengan militer. Perlunya pembentukan peradilan militer karena tugas militer berbeda dengan tugas warga negara lainnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan militer juga mengatur tentang hukum acara pidana militer yang berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1970 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tanpa mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer diantaranya :

1. Asas kesatuan komando.

Dalam kehidupan militer dengan sutruktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan yang sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak buahnya. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut di atas, dalam hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Namun dalam Hukum Acara Pidana Militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

2. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya.

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya asas ini adalah kelanjutan dari asas kesatuan komando.

3. Asas kepentingan militer.

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan namun khususdalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Dan setiap militer tersebut adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bermoral dan tunduk kepada hukum serta peraturan perundang-undangan, bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai militer, berdisiplin serta taat kepada atasan.

Adapun tugas pokok militer adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa yang dapat diartikan tugas untuk berperang dan bertempur. Untuk melaksanakan tugas tersebut Tentara Nasional Indonesia harus disiapkan dan dibina dengan ketentuan-ketentuan hukum yang keras bagi militer.

Pada dasarnya Hukum Militer memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

1. Merupakan hukum khusus yang bersifat mandiri di lingkungan militer.

Dikatakan bahwa karakteristik Hukum Militer merupakan hukum khusus yang bersifat mandiri adalah karena militer mempunyai hukum yang berbeda dari instansi manapun. Tujuan perbedaan peraturan ini adalah agar militer dalam melakukan tugas dan kewajiban dalam mempertahankan integritas kedaulatan bangsa dan negara dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin.

2. Mengatur materi muatan yang berkaitan dengan soal-soal militer untuk kepentingan pertahanan negara.

Materi muatan dalam hukum militer kesemuanya adalah semata-mata hanya demi kepentingan integritas bangsa dan negara, dimana militer selain berpedoman kepada hukum militer yang tertulis, militer juga tidak mengabaikan asas tata kehidupan militer (disiplin militer).

3. Berlaku di daerah tertentu dan dalam keadaan darurat berlaku juga pada lingkungan yang lebih luas.

Dalam hal ini, hukum militer yang dapat berlaku di daerah tertentu dan dalam keadaan darurat berlaku juga pada lingkungan yang lebih luas adalah hukum militer pada saat pertempuran dimana pada saat terjadi pertempuran pengadilan yang berlaku adalah Pengadilan Militer Pertempuran yang bersifat mobilitas mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan atau berdaerah hukum di daerah pertempuran.

4. Sumber pada hukum nasional dan hukum internasional.

Hukum militer bersumber pada hukum nasional adalah merupakan suatu keharusan, karena hukum militer adalah merupakan sub sistem pada hukum nasional dimana

hukum militer tersebut didasarkan pada norma-norma yang ada pada negara kita dan merupakan cerminan dari pertahanan negara kita.

Sedangkan hukum militer yang bersumber pada hukum internasional adalah merupakan suatu bukti bahwa militer di Indonesia tidak berbeda dengan militer di negara lain yang memiliki satu tujuan yaitu menciptakan perdamaian dunia.

5. Berlakunya hukum militer dalam keadaan darurat atau perang dapat mengelemisir untuk sementara waktu berlakunya peraturan-peraturan hukum tertentu yang seharusnya mengikat pada saat negara berada dalam keadaan normal.

Karakteristik hukum militer tersebut mengakibatkan sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat menilai dalam kasus militer sering kali tidak tersentuh oleh hukum dan Peradilan Militer dianggap sebagai lembaga impunitas (lembaga yang tutup untuk umum).

Dalam organisasi yang berdasarkan aturan dan menyertakan embel-embel militer selama ini dipandang sebagai organisasi yang tertutup oleh sebagian besar masyarakat. Pandangan ini tidak menutup kemungkinan ditujukan kepada Peradilan Militer yang selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktifitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit militer yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil-adilnya.

Hal seperti ini disebabkan karena tidak adanya jalur informasi dari dalam organisasi peradilan militer ke masyarakat luar, hanya sebatas humas saja yang memberikan penjelasan kepada masyarakat yang ingin mengetahui atau yang menanyakannya, atau setidaknya pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara tentang proses penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Militer. Sehingga Hukum Militer kurang mendapat perhatian padahal hukum militer merupakan suatu disiplin ilmu yang patut diajarkan serta dikembangkan kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Seiring cepatnya laju perkembangan informasi di masyarakat, organisasi peradilan militer semakin terbuka dengan memanfaatkan media internet, membuat website yang memuat informasi-informasi tentang Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia. Hal ini mendorong rasa ingin tau masyarakat terhadap Peradilan Militer untuk lebih mendalam lagi, sehingga muncul tantangan terhadap peradilan militer terutama Pengadilan Militer untuk dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat akan

keterbukaan informasi di Pengadilan Militer tanpa menanggalkan asas-asas dasar militer. Hal inilah yang tengah diupayakan oleh Pengadilan Militer agar dapat memenuhi rasa kepercayaan masyarakat, terutama setelah berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari :

- a. Pengadilan Militer.
- b. Pengadilan Militer Tingkat Banding.
- c. Pengadilan Militer Utama.
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengadilan Militer yang berwenang megadili perkara pidana anggota militer seluruh angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) atau yang dipersamakan dengan militer di wilayah Kalimantan Barat adalah Pengadilan Militer I-05/Pontianak, yang merupakan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan untuk Pengadilan Militer Tingkat Bandingnya adalah Pengadilan Militer Tinggi – I/Medan.

Pengadilan Militer I-05/Pontianak (Dilmil I-05 Pontianak) berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana prajurit berpangkat Prada sampai dengan Kapten yang berdinast/bertugas di wilayah Kalimantan Barat. Dari salah satu perkara yang diperiksa dan diputuskan oleh Dilmil I-05 Pontianak, oleh Terdakwa dimohonkan untuk banding ke Pengadilan Militer Tinggi I/Medan (Dilmilti I/Medan), yang oleh Dilmilti I/Medan dalam putusannya memutuskan perkara banding tersebut “memerintahkan Dilmil I-05 Pontianak untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara yang telah diputus oleh Dilmil I-05 Pontianak”.

Bahwa salah satu wewenang Pengadilan Militer Tinggi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Selain itu, Pengadilan Militer Tingkat Banding berwenang membatalkan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama apabila Pengadilan Militer Tingkat Banding berpendapat ada kekeliruan penerapan hukum acara oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama

sebagaimana dalam Pasal 227 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan ;

Pasal 227

(1) Apabila Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tingkat Banding dengan putusannya dapat memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tingkat Banding melakukannya sendiri.

(2) Apabila perlu, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama sebelum Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan akhir.

Pasal 228

(1) Sesudah semua hal dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dipertimbangkan dan dilaksanakan, Pengadilan tingkat banding mengambil putusan, menguatkan atau mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama.

(2) Dalam hal Pengadilan tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat banding memutus sendiri.

Dari pasal tersebut di atas, putusan yang dimaksud (Studi kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi –I/Medan) mengalami beberapa persoalan. Salah satunya pengertian putusan tersebut merupakan putusan akhir (putusan final) atau berupa putusan sementara (putusan sela). Dan pengertian “memperbaiki” di atas termasuk di dalamnya pengertian untuk “menyidangkan ulang” suatu perkara dari awal, dengan menggunakan surat dakwaan baru, dengan berkas perkara dari penyidik POM (Polisi Militer) yang sama (yang terdahulu). Serta kewenangan Hakim Pengadilan tingkat banding untuk membatalkan Surat Dakwaan Oditur Militer tingkat pertama.

Permasalahan

1. Bagaimana penerapan Pasal 227 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam kasus asusila tersebut (Studi kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi –I/Medan) ?

2. Bagaimana seharusnya putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam kasus asusila tersebut (Studi kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi – I/Medan) dalam Pasal 227 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer ?

Pembahasan

1. Penerapan Pasal 227 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Oleh Hakim Pengadilan Militer Tinggi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi – I/Medan).

Putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama berdasarkan penerapan Pasal 227 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh Hakim Pengadilan Militer Tinggi I/Medan, yakni putusan Pengadilan Militer Tinggi – I/Medan Nomor : 41-K/PMT.I/BDG/AD/IV/2012 tanggal 08 Mei 2012 terhadap putusan Pengadilan Militer I-05/Pontianak Nomor : 01-K/PM. I-05/AD/I/2012 tanggal 07 Maret 2012 dalam perkara pidana asusila yang dilakukan oleh salah satu anggota Brigif 17/KH.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana ini, Oditur Militer I-05/Pontianak menerima berkas dari Polisi Militer Kodam XII/Tanjungpura Nomor : BP-55/A-50/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011. Kemudian perkara pidana ini diajukan ke Pengadilan Militer I-05/Pontianak berdasarkan Skeppera dari Dan Brigif 19/KH selaku Papera Nomor : Kep/84/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 dengan Surat Dakwaan Oditur Militer I-05/Pontianak Nomor : Sdak/04/K/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 yang berbentuk alternatif yaitu :

Alternatif pertama : pasal 281 ke -1 KUHP

atau

Alternatif kedua : pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Setelah proses pemeriksaan sidang di Pengadilan Militer I-05/Pontianak, Pengadilan Militer I-05/Pontianak mengeluarkan putusan Nomor : 01-K/PM. I-05/AD/I/2012 tanggal 07 Maret 2012 (putusan I dalam perkara studi kasus), yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :Budi,Praka NRP. 31030232340181. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan zina.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. dst...
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05/Pontianak Nomor : 01-K/PM. I-05/AD/I/2012 tanggal 07 Maret 2012 (putusan I dalam studi kasus) tersebut di atas, Terdakwa mengajukan upaya banding melalui Penasehat Hukumnya ke Pengadilan Militer Tinggi –I/Medan. Setelah proses pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Militer Tinggi –I/Medan mengeluarkan putusan Nomor : 41-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2012 tanggal 08 Mei 2012 (putusan ke-2 dalam studi kasus) yang amarnya adalah :

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa BUDI PRAKA NRP.31030232340181.
2. Membatalkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-05/Pontianak Nomor : Sdak/04/K/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 dan Putusan Pengadilan Militer I-05/Pontianak Nomor : PUT/01-K/PM I-05/AD/I/2012 tanggal 07 Maret 2012.

MENGADILI SENDIRI

1. Memerintahkan Pengadilan Militer I-05/Pontianak, untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara Terdakwa tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.
2. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05/Pontianak.

Keputusan Pengadilan Militer Tinggi – I / Medan Nomor : 41 – K/PMT – I/BDG/AD/IV/2012 tanggal 8 Mei 2012 (putusan ke-2 dalam studi kasus), Hakim menemukan adanya perubahan surat dakwaan dari Oditur yang dilakukan dengan cara hanya menyerahkan kepada panitera 7 (tujuh) hari sebelum sidang dengan membuat nomor, tanggal yang sama sehingga terdapat 2 (dua) surat dakwaan dengan nomor yang sama sehingga tidak jelas surat dakwaan mana yang berlaku dalam persidangan tersebut. Dan tidak ternyata salinan perubahan surat dakwaan tersebut disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Papera sehingga hal ini telah merugikan kepentingan Terdakwa (dalam pembelaannya) dan Papera.

Bahwa Hakim Dilmulti I/Medan dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dan dalam mengadili perkara ini tidak melaksanakan hukum acara sebagaimana mestinya serta cara mengadili perkara ini tidak menurut ketentuan undang-undang, yang memuat keterangan Saksi-1 yang tidak berdasarkan Berita acara sidang (BAS) tetapi diambil dari Berita acara pendapat (Bapat) Oditur. Oleh karena itu, putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut melanggar Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, hakim tingkat banding berpendapat surat dakwaan Odmi I-05/Pontianak Nomor : Sdak/04/K/I/2012 tanggal 3 Januari 2012 dan Putusan Dilmil I-05/Pontianak Nomor : Put/01-K/PM-I-05/AD/I/2012 tanggal 7 Maret 2012 dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum acara harus dinyatakan batal demi hukum selanjutnya memerintahkan Dilmil I-05/Pontianak untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Dalam putusan pengadilan militer tingkat banding ini, sebelum “mengadili” hakim mengingat atau yang dijadikan dasar hukum putusan adalah Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 227 jo Pasal 228 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pengadilan militer I-05/Pontianak melaksanakan sidang ulang terhadap perkara asusila yang telah diputusnya, dengan berkas perkara dan Skeppera

yang sama, tetapi dengan surat dakwaan baru yang berbeda yaitu Nomor : Sdak/43/K/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 dengan dakwaan : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP (semula surat dakwaan Nomor : Sdak/04/K/I/2012 tanggal 3 Januari 2012 dengan dakwaan alternatif, alternatif pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP atau alternatif kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP).

Pemeriksaan perkara yang ke-2 kalinya telah selesai dilaksanakan Pengadilan militer I-05/Pontianak dengan Nomor : 43-K/PM. I-05/AD/VII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 (putusan yang ke-3 dalam studi kasus) dengan amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Budi, Praka NRP 31030232340181 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan zina.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
a. dst...
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa melakukan upaya banding yang kedua kalinya dalam perkara yang sama ini terhadap putusan Pengadilan militer I-05/Pontianak yang kedua dalam perkara yang sama. Pengadilan Militer Tinggi I/Medan memeriksa ke-2 kalinya berkas perkara yang telah diputusnya, yang dimohonkan banding oleh Terdakwa.

Majelis hakim pengadilan militer tinggi I/Medan memutuskan dalam putusannya Nomor : 41-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2012 (putusan yang ke-4 dalam studi kasus) tanggal 5 Oktober 2012 dengan amar putusan adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa BUDI PRAKA NRP 31030232340181.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-05/Pontianak Nomor : 43-K/PM. I-05/AD/VII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-05/Pontianak Nomor : 43-K/PM. I-05/AD/VII/2012, tanggal 14 Agustus 2012, untuk selebihnya
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

2. Penerapan Pasal 227 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi – I/Medan).

Keputusan Pengadilan Militer Tinggi – I / Medan Nomor : 41 – K/PMT – I/BDG/AD/IV/2012 tanggal 8 Mei 2012 (putusan ke-2 dalam studi kasus), MENGADILI SENDIRI, pada poin 1 “Memerintahkan Pengadilan Militer I-05/Pontianak, untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara Terdakwa tersebut, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku” bertentangan dengan Pasal 227 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang sebagai Hukum Acara Militer pada :

Pasal 227

- (1) Apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, Pengadilan Tingkat Banding dengan putusannya dapat memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan tingkat banding melakukannya sendiri.
- (2) Apabila perlu, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama sebelum Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan akhir.

Berdasarkan penjelasan dari “memperbaiki” yang dimaksud pada Pasal 227 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer diatas adalah Perbaikan dalam hal ada kelalaian dalam penerapan Hukum

Acara harus dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan. Jadi, bukan untuk membatalkan Surat Dakwaan Oditur, memeriksa dan mengadili kembali dengan menyidangkan ulang perkara yang telah diputus di Pengadilan yang sama dengan Surat Dakwaan baru dari Oditur. Dengan membatalkan Surat Dakwaan Oditur tersebut oleh Pengadilan Militer Tinggi –I/Medan dengan putusan Nomor : 41 – K/PMT – I/BDG/AD/IV/2012 tanggal 8 Mei 2012 telah melampaui kekuasaannya sebagai Pengadilan Militer Tingkat Banding.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang merupakan Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi adalah sebagai berikut :

Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi

Pasal 41

- (2). Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi –I/Medan Nomor : 41-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2012 tanggal 08 Mei 2012 tersebut, Pengadilan Militer I-05/Pontianak menggelar sidang ulang guna melakukan pemeriksaan kembali atau yang ke-2 terhadap Terdakwa dalam tindak pidana yang sama dengan surat dakwaan yang baru dari Oditur Militer I-05/Pontianak Nomor : Sdak/43/K/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012 dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. Dan hal tersebut dilakukan oleh Pengadilan Militer I-05/Pontianak tanpa memperhatikan kekuatan dari putusan banding tersebut dikarenakan putusan Pengadilan Militer Tinggi –I/Medan Nomor : 41-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2012 tanggal 08 Mei 2012 tersebut merupakan jenis putusan akhir (bukan putusan sela), maka terhadap ke dua belah pihak yaitu Terdakwa dan Oditur seharusnya diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut (permohonan kasasi), akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Pengadilan Militer I-05/Pontianak selaku Pengadilan tingkat pertama dengan alasan menjalankan perintah putusan Pengadilan tingkat banding, sebagai pengadilan yang lebih tinggi.

Putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi –I/Medan Nomor : 41-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2012 tanggal 08 Mei 2012 tersebut dapat di

kategorikan sebagai putusan akhir, yaitu dikarenakan dalam amar putusan tersebut terdapat kata-kata “mengadili” serta “mengadili sendiri” dan telah ada pembebanan biaya perkara (dalam hal ini dibebankan kepada negara). Namun apabila kita mencermati putusan tersebut pada “mengadili sendiri” poin 2 (dua) yaitu : “Membebaskan Terdakwa dari tahanan” yang mana seharusnya hal tersebut di muat dalam suatu penetapan hakim Pengadilan Militer Tinggi –I/Medan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 225 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan : “Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak menerima berkas perkara banding dari Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun karena permintaan Terdakwa”, sehingga putusan tersebut mencampurkan penetapan hakim dan putusan akhir.

Dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi –I/Medan (Pengadilan tingkat banding) telah mengeluarkan sebuah putusan (yang merupakan Putusan Akhir, bukan Putusan Sela) Nomor : 41-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2012 tanggal 08 Mei 2012 dengan demikian Pengadilan Militer Tinggi –I/Medan telah melaksanakan Pasal 228 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, hal ini berarti Pasal 227 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah dilaksanakan pula oleh Pengadilan Militer Tinggi –I/Medan, akan tetapi Pengadilan Militer Tinggi –I/Medan (Pengadilan tingkat banding) dalam amar MENGADILI SENDIRI poin 1, “memerintahkan Pengadilan Militer I-05/Pontianak untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara Terdakwa tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku”. Yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 227 jo Pasal 228 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kemudian selain daripada hal tersebut diatas, terhadap Putusan banding (yang merupakan suatu Putusan Akhir bukan Putusan Sela) yang menjadi dasar Pengadilan Militer I-05 Pontianak untuk melaksanakan sidang ulang (mengadili kembali) perkara pidana Terdakwa, kepada Terdakwa atau Oditur tidak diberikan hak untuk melakukan upaya hukum selanjutnya (kasasi). Proses pemeriksaan kembali atau yang ke-2 di Pengadilan Militer I-05/Pontianak, Pengadilan Militer I-05/Pontianak mengeluarkan

putusan kembali untuk perkara pidana Terdakwa tersebut dengan putusan Nomor : 43-K/PM. I-05/AD/VII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Budi,Praka NRP. 31030232340181 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan zina.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
a. dst....
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Kemudian Terdakwa kembali mengajukan banding kembali (yang ke-2) ke Pengadilan Militer Tinggi –I/Medan terhadap putusan Pengadilan Militer I-05/Pontianak yang ke-2 dengan Nomor : 43-K/PM. I-05/AD/VII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tersebut. Atas permohonan banding kembali atau yang ke-2 tersebut, Pengadilan Militer Tinggi –I/Medan kembali mengeluarkan putusan akhir yang ke-2 dengan Nomor putusan yang sama yaitu, Nomor : 41-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2012 tanggal 05 Oktober 2012 yang dalam amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan,menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Budi,Praka NRP. 31030232340181.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05/Pontianak Nomor : 43-K/PM. I-05/AD/VII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-05/Pontianak Nomor : 43-K/PM.I-05/AD/VII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05/Pontianak.

Bahwa dari peristiwa hukum yang telah terjadi di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer yakni Pengadilan Militer Tingkat Pertama (dalam hal ini Pengadilan Militer I-05/Pontianak) dan Pengadilan Militer Tingkat Banding (dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi –I/Medan) tersebut di atas mengakibatkan adanya 2 (dua) putusan akhir dari Pengadilan Militer I-05/Pontianak dan 2 (dua) putusan akhir dari Pengadilan Militer Tinggi –I/Medan terhadap perkara pidana yang sama dengan Terdakwa yang sama.

Penutup

Setelah menguraikan putusan-putusan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dengan adanya pemeriksaan ulang pada Pengadilan tingkat pertama dan pada Pengadilan Tingkat banding yang mengakibatkan adanya 2 (dua) putusan akhir dari setiap tingkat pemeriksaan tersebut mencerminkan kurangnya kepastian hukum. Apalagi dapat kita lihat dari hukuman perampasan kemerdekaan Terdakwa pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi –I/Medan Nomor : 41-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2012 tanggal 08 Mei 2012 (putusan yang pertama) Mengadili Sendiri, Membebaskan Terdakwa dari tahanan. Namun pada putusan yang ke-2 dengan nomor yang sama tetapi tanggal berbeda, tanggal 05 Oktober 2012, Mengadili dengan pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
2. Dari segi substansi, banyak ketentuan perundang-undangan yang merupakan produk lama seperti KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer) merupakan produk masa Hindia Belanda, yang tentunya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan militer saat ini dan untuk masa yang akan datang. Sementara itu dalam hukum formil (acara) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih menunggu peraturan pelaksanaannya baik yang berupa peraturan pemerintah maupun yang berupa keputusan-keputusan Panglima TNI. Kendala lain dalam kinerja peradilan

militer adalah penataan pengorganisasian peradilan dan usia pensiun prajurit. Untuk pengisian jabatan-jabatan hakim sampai saat ini sangat kurang pada setiap pengadilan militer di Indonesia, belum lagi yang akan memasuki masa pensiun maka terjadi penyusutan personil peradilan. Akibatnya peradilan militer selalu kekurangan tenaga-tenaga yang sarat kemampuan dan pengalamannya dibidang peradilan pidana.

Daftar Pustaka

- Addurrahman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1979.
- Anwar, Dewi Fortuna, Peran Sosial ABRI, Masalah dan Prospeknya, Laporan Penelitian, Puslitbang Politik dan Kewilayahan – LIPI, Jakarta, 1997
- Anwar, Rosihin, Hubungan Sipil Militer di Berbagai Negeri, Study Group Mahasiswa, Cempaka Putih Jakarta, 1967.
- Asshiddiqie, Jimly, Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1996.
- Perbandingan Hukum Pidana, Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 2, 1994.
- Kebijakan Formulasi Ketentuan Hukum Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme, 1986, Bina Cipta, Bandung, Cet. II, 1986.
- Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni, Bnadung, 1982.
- Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana, Alumni, Bandung, 1971.
- Blaw, Peter, M. Dan Meyer, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1087.
- Badan Pembinaan Hukum ABRI, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara RI, Cet. I. Tahun 1976.
- Crouch, Harold dan Haji Ahmad Zakaria, Militer dan Politik Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil, Latihan Ujian Hukum Pidana, Sinar Grafika, 1995.
- Djajprawira, Anang, Hukum Militer, Penganyunannya Dalam Lingkungan Kepolisian RI, Jakarta, 1969.
- Darwan Parinst, Peradilan Militer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Erdianto Efendi, SH., M. Hum, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Faisal Salam, Moch., SH, MH, Peradilan Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Harahap, M. Yahya, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 1988.
- Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hamzah, Andi, Reformasi Penegakan Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum, Tri Sakti, Jakarta, 1998.
- Hartono, Sunaryati, Politik Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.

- Hulsman, M.L. Hc., Sitem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, Alih Bahasa : Soedjono Dirdjosisworo (The Dutch Criminal Justice System From A Comprative Legal Perpektive), Rajawali, Jakarta, 1984.
- Hardi, Rinam, Dwi Fungsi ABRI, Mau Kemana, Yogyakarta, 1998.
- Kanter, E.Y., G30S/PKI Dihadapan Mahmil, Seri Penerbitan Pusdik Kehakiman AD, AHM-PTHM.
- Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, PT. HM Jakarta, 1982.
- Kanter E.Y dan S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, Bagian Satu.
- Kartono, Peradilan Bebas, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972.
- Kusuma, Mulya W., Perspektif, Teori dan Kebijakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Liberti, Yogyakarta, 1991.
- Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Manfaatnya bagi Bangsa Indonesia, Liberti, Yogyakarta, Cet. II, 1983.
- Moeljatno Mr.Prof, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab dalam Hukum Pidana, Yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955.
- Muladi, Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 1997.
- Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, Edisi Revisi, 1992.
- Nasution, A. Haris, Kekaryaan ABRI, Seruling Massa, Jakarta, 1971.
- Catatan-catatan Sekitar Politik Militer Indonesia, Pembimbing, CV. Jakarta, 1955.
- Pokok-pokok Gerilya, Pembimbing, Cet. II, Jakarta, 1954.
- Poernomo, Bambang, Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP, Liberty, Yogyakarta, Cet. I, 1982.
- Pusat Studi Hukum Militer, Jurnal Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta Barat, 2006.
- Prinst, Darmawan, Hukum Acara Pidana, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana, Eresco, Bandung, 1989.
- Prodjohamidjojo, Martiman, Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan, Seri Pemerataan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti, Jakarta, Tri Ubaya Cakti, 1961
- P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, Edisi Revisi, 1991.
- Hukum dan Birokrasi, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1089.
- Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1983.
- Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Aneka Persoalan dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1983.

- Keadaan dan Permasalahan Dalam Penegakan Hukum Dewasa Ini, BPHN, Jakarta, 1982.
- Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1980.
- Roeslan Saleh, SH, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Centra, Jakarta, 1968.
- Sadli, Saparinah, Perspektif Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.
- Satochid Kartanegara, SH, Prof, Hukum Pidana Umum, Akademi Hukum Militer, Jakarta, 1963.
- Singh, Bilver, Dwifungsi ABRI, Asal-usul Aktualisasi dan Implikasinya Bagi Stabilitas dan Pembangunan, Gramedia Pusaka utama, Jakarta, 1995.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, SH, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Politik, Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum), Badan Penerbit Undip, Semarang, 1998.
- Hukum Sebagai Sarana Untuk Melakukan Pengendalian Sosial dan Rekayasa Masyarakat, Masalah Hukum, Majalah FH Undip, Semarang, Nomor 6, Semarang 1989,
- Perspektif Sosial Dalam Permasalahan Masalah-masalah Hukum, CV. Agung, Semarang, 1989.
- Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Ilmu Hukum, Tanpa tahun.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2002.
- Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1984
- Penegakan Hukum, BPHN, Jakarta, 1983.
- Beberapa Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembangunan Indonesia, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1975.
- Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1982.
- Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum, Makalah pada seminar hukum ke-iv, Jakarta, 1971.
- Soerjono Soekanto dan Abdullah, Mustafa, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali Jakarta, Cetakan II, 1982
- S.R Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta, Alumni AHM-PTM, 1985.
- Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1986.
- Sonson Basar, Perkembangan Peradilan Militer Setelah Berada Di Bawah Organisasi Mahkamah Agung RI, Dirjen TUN & MIL MARI, 2004.
- Susanto, I. S., Kriminologi, FH. Undip, Semarang, 1995
- Persepsi Remaja dan Polisi Mengenai Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Pusat Studi Kepolisian FH. Undip, 1994.
- Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, (Dalam Masalah-masalah Hukum Nomor 9 Tahun 1992).
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.

- Kapita Selekta Hukum Pidana, Tahun 1986.
- Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sumarno, Kohar Hori, Hukum dan Ketahanan Nasional, Dari pengalaman seorang Jaksa, Sinar Harapan, Jakarta, 1986.
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Sutarto, Surjono, Sari Kuliah Hukum Acara Pidana, Yayasan Cendikiawan Purna Dharma, Semarang, 1987.
- Syarif, Amirroedin, Hukum Disiplin Militer, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Disiplin Militer dan Pembinaannya, Galia Indonesia, Jakarta, 1982
- Tambunan, Brigjen (Purn) A.S.S, SH, Hukum Militer, Perguruan Tinggi Hukum Militer, Jakarta, 1967.
- Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta Barat, 2005.
- TNI, Markas Besar, Kapita selekta sosial politik ABRI, Jakarta, 1994.
- Paradigma Baru, Peran Sosial Politik ABRI, Sebuah upaya sosialisasi, Jakarta, 1998.
- Kapita Selekta Sosial Politik ABRI, Jakarta, 1994
- TNI, Sekolah Staf dan Komando, Konsepsi Peningkatan Profesionalisme ABRI Menghadapi Tantangan pada Abad 21, Hasil seminar Sekolah Kursus Reguler XXIV Sesko ABRI TA. 1997/1998, Bandung, 1997.
- Tresna R. Mr, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Tiara Limited, Jakarta, 1959.
- Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, VV. Versluys, Jakarta.
- Utercht E. Dr, Hukum Pidana I, Penerbit Universitas Gajah Mada, Cetakan ke-2, Bandung, 1960.
- Wantjik K, Saleh ,SH, Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata, PT. Ihtiar Baru, Jakarta, 1973.
- Widyadharma, Ridwan, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Tanjung Mas, Semarang, Cetakan II, 1983.
- Wirjono Prodjodikoro, Dr, SH, 1969 Tindak Pidana Tertentu, PT. Eresco, Jakarta, 1967.
- Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Eresco, Jakarta, 1969.
- Yosfiah, M. Yunus, Kebijaksanaan dan strategi ABRI dalam penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, Lokakarya Nasional HAM, Jakarta, 1992.
- Zainal. M, Rivai, Hukum Militer I, Pusat Infantri, Bandung, 1957.

Undang – Undang :

- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Hukum Pidana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.